

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dan Kinerja Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

Rudi¹, Amransyah², Rizkiawan³, Jumri⁴

^{1,2,3,4} STIE Nusantara Sangatta -¹rudistienusantara@gmail.com

-²amransyhsangatta@gmail.com

-³rizkiawan@stienusantara.ac.id

-⁴jumrinusantarasangatta@gmail.com

Abstract -This study aims to determine the influence of the Regional Financial Information System and Apparatus Competence on the Quality of Regional Financial Reports and Budget Performance at the Kutai Timur Regency DPRD Secretariat. A sample size of 35 respondents was used. The sampling technique used was a census, with all employees in the finance department participating. Data analysis used was descriptive quantitative, using multiple regression supported by SPSS 25 software.

The results of the t-test showed that the regional financial information system had no effect on the quality of regional financial reports, apparatus competence did affect the quality of regional financial reports, the regional financial information system had no effect on budget performance, and apparatus competence did affect budget performance. The first coefficient of determination obtained from the independent variables (X_1 and X_2 against Y_1) in this study was 76.8 percent, and the second coefficient of determination obtained from the independent variables (X_1 & X_2 against Y_2) in this study was 84.4 percent.

Keywords: *Regional Financial Information System, Apparatus Competence, Quality of Regional Financial Reports & Budget Performance*

1.PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kualitas laporan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan tersebut. Dalam konteks ini, dua faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi keuangan daerah dan kompetensi aparatur pengelola keuangan. Menurut Roviyantje dalam Dwianti (2019:2) laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Karenanya dibutuhkan aparatur yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga pada entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Sistem informasi keuangan daerah, seperti sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berperan dalam memfasilitasi proses penganggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan secara efisien dan akurat. Nurgaheni & Subaweh (2008:45) menunjukkan bahwa penerapan SIPKD yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, kompetensi aparatur

pengelola keuangan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Di Kabupaten Kutai Timur sendiri pengelolaan keuangan daerah mengalami dinamika yang menarik. Pada tahun 2023 pendapatan daerah mengalami peningkatan signifikan mencapai Rp 5,124 triliun, yang merupakan kenaikan sebesar 167% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun meskipun ada peningkatan pendapatan, realisasi belanja daerah juga meningkat menjadi Rp 7,54 triliun, mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif. Selain itu realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kutim untuk tahun 2024 baru mencapai 18,30% menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran oleh DPRD.

Kompetensi aparatur di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sebagai lembaga yang berperan dalam pembuatan peraturan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, kualitas sumber daya manusia di DPRD sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas tersebut.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) merupakan cerminan dari transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), penyusunan LKPD yang berkualitas tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kualitas laporan keuangan ini tercermin dalam upaya Pemkab Kutim untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi indikator utama dalam menilai kualitas LKPD. Namun, meskipun Pemkab Kutim berhasil meraih opini WTP pada tahun 2024, BPK mencatat adanya 33 temuan dan mengeluarkan 105 rekomendasi perbaikan. Temuan-temuan tersebut mencakup masalah dalam penatausahaan aset tetap dan utang, kelebihan pembayaran atau pembayaran ganda dalam kontrak pekerjaan, ketidaksesuaian pelaksanaan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang honorarium, pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal, serta masalah dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah.

Kinerja anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan oleh lembaga legislatif daerah. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembuatan peraturan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, kualitas pengelolaan anggaran di DPRD sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas tersebut.

Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2019:3) mengemukakan pengertian manajemen keuangan dapat dirumuskan dari tugas dan tanggung jawab para manajer keuangan, meskipun tugas dan tanggung jawabnya berbeda-beda pada setiap perusahaan, namun tugas pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden pada berbagai perusahaan.

Menurut D. Agus Harijto dan Martono (2019:4) manajemen keuangan adalah aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah ilmu mendapatkan dana dan mengelola dana perusahaan supaya produktif.

Menurut Irham Fahmi (2020:4) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali dan memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Dian Wijayanto (2019:233), tujuan manajemen keuangan adalah

memaksimalkan kekayaan dan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan sering disebut sebagai pendekatan tradisional dan sempit dari tujuan manajemen keuangan.

Indra Bastian (2006:43). Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010:84-86) indikator kinerja anggaran yaitu :

1. Masukkan (*input*)
2. Keluaran (*output*)
3. Hasil (*outcome*)
4. Manfaat (*benefit*)
5. Dampak (*impact*)

Menurut Bahri (2016:11) berpendapat bahwa, laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, harus dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi, laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bahri, 2016:71).

Menurut Hanafi & Halim (2016:47) indikator kualitas laporan keuangan yaitu

1. Relevan
2. Handal
3. Dapat Dipahami
4. Dapat Dibandingkan

Menurut Wibowo (2014:320) menyatakan bahwa definisi kompetensi aparatur adalah Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Wibowo (2014:322) indikator kompetensi aparatur adalah :

1. Perilaku
2. Keterampilan
3. Pengetahuan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan juga auditabel.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka mempercepat transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diolah Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kemendagri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah, dalam rangka mengimplementasikan dan menginterpretasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

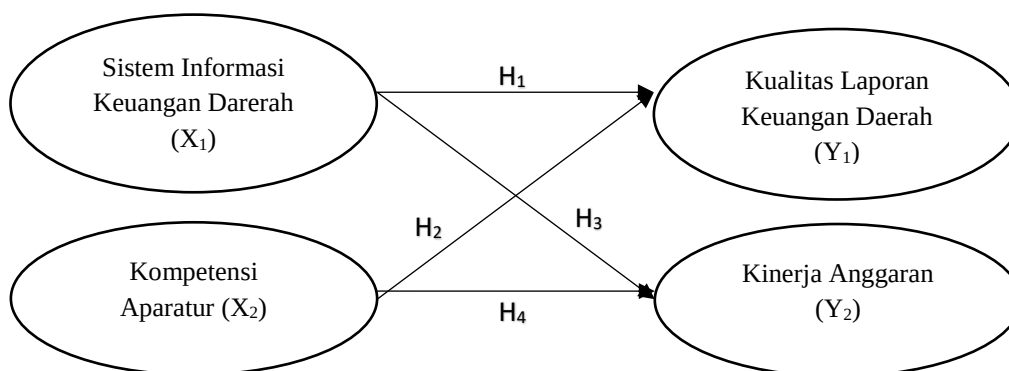
Menurut Yusup (2016:153) fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah seperti penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
2. Menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien.
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
4. Menyajikan informasi yang akurat.

Menurut Erma, Shinta Permatasa Sari (2014:31) indikator Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu :

1. Tingkat Ketepatan Waktu
2. Tingkat Fleksibilitas
3. Tingkat Efisiensi Biaya
4. Tingkat Daya Audit

Gambar 1 Kerangka Pikir



Sumber : Peneliti 2026

2.METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada 2025 hingga 2026. Tempat penelitian ini adalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai bagian keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah pegawai sebanyak 35 orang. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 35 responden. Adapun alat analisis yang digunakan ialah Regresi Berganda

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian uji validitas tiap indikator semua lebih besar dari 0.344, dengan kata lain bahwa semua indikator pertanyaan dapat dikatakan valid. Adapun pengujian uji validitas sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	Kriteria r_{tabel}	Correlation	Keterangan
	X _{1.1}	0,344	0,956	Valid

Sistem Informasi Keuangan Daerah (X ₁)	X _{1.2}	0,344	0,932	Valid
	X _{1.3}	0,344	0,934	Valid
	X _{1.4}	0,344	0,902	Valid
Kompetensi Aparatur (X ₂)	X _{2.1}	0,344	0,950	Valid
	X _{2.2}	0,344	0,941	Valid
	X _{2.3}	0,344	0,911	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y ₁)	Y _{1.1}	0,344	0,845	Valid
	Y _{1.2}	0,344	0,904	Valid
	Y _{1.3}	0,344	0,817	Valid
	Y _{1.4}	0,344	0,848	Valid
Kinerja Anggaran (Y ₂)	Y _{2.1}	0,344	0,757	Valid
	Y _{2.2}	0,344	0,911	Valid
	Y _{2.3}	0,344	0,936	Valid
	Y _{2.4}	0,344	0,882	Valid
	Y _{2.5}	0,344	0,937	Valid

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi (R²)

Variabel	R Square
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y ₁)	0.768
Kinerja Anggaran (Y ₂)	0.840

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3 Nilai Koefisien Determinasi (R²) untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y₁) memiliki nilai sebesar 0.768. Hal ini berarti bahwa nilai sebesar 76.8 persen Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y₁) dapat dijelaskan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₁) dan Kompetensi Aparatur (X₂). sedangkan sisanya sebesar 23.2 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Nilai Koefisien Determinasi (R²) untuk variabel Kinerja Anggaran (Y₂) memiliki nilai sebesar 0.840. Hal ini berarti bahwa nilai sebesar 84 persen Kinerja Anggaran (Y₂) dapat dijelaskan oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (X₁) dan Kompetensi Aparatur (X₂), sedangkan sisanya 16 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain luar model penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Keterangan	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig	Hipotesis
1.	Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	-0.095	1.694	0.925	H ₀ Diterima dan H _a Ditolak
2.	Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	2.893	1.694	0.007	H _a Diterima dan H ₀ Ditolak
3.	Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Anggaran	0.259	1.694	0.797	H ₀ Diterima dan H _a Ditolak
4.	Kompetensi Aparatur terhadap Kinerja Anggaran	3.275	1.694	0.003	H _a Diterima dan H ₀ Ditolak

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

- Berdasarkan Tabel 4 Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sistem Informasi Keuangan Daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar -0.095 lebih kecil dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,925 yang lebih besar dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil Hipotesis pertama atau H₀ diterima dan H_a ditolak.
 2. Kompetensi Aparatur menunjukkan t_{hitung} sebesar 2.893 lebih besar dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,007 yang lebih kecil dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil Hipotesis kedua atau H_a diterima dan H₀ ditolak.
 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar 0.295 lebih kecil dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,797 yang lebih besar dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran. Hasil Hipotesis ketiga atau H₀ diterima dan H_a ditolak.
 4. Kompetensi Aparatur menunjukkan t_{hitung} sebesar 3.275 lebih besar dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,003 yang lebih kecil dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran. Hasil Hipotesis keempat atau H_a diterima dan H₀ ditolak.

Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Variabel	Sig
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y ₁)	0.000
Kinerja Anggaran (Y ₂)	0.000

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Uji F (Uji Simultan) untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y₁) memiliki nilai signifikan F sebesar 0.000 lebih kecil dari α 0,05. Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Aparatur berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Nilai Uji F (Uji Simultan) untuk variabel variabel Kinerja Anggaran(Y_2) memiliki nilai signifikan F sebesar 0.000 lebih kecil dari α 0,05. Artinya Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Aparatur berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

Hasil uji parsial menunjukkan nilai sistem informasi keuangan daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar - 0,095 lebih kecil dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,925 yang lebih tinggi dari α 0,05, oleh sebab itu hipotesis pertama atau H_0 diterima dan H_a ditolak. yaitu sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Artinya Tidak adanya pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan (baik berupa perangkat lunak, aplikasi, maupun infrastruktur teknologi pendukungnya) belum menjadi faktor yang secara signifikan menentukan baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar sistem informasi itu sendiri.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

Hasil uji parsial menunjukkan nilai kompetensi aparatur menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,893 lebih kecil dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,670 dan nilai signifikannya sebesar 0,007 yang lebih rendah dari α 0,05. oleh sebab itu hipotesis kedua atau H_a diterima dan H_0 ditolak artinya kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Artinya Adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan baik buruknya laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apa pun sistem informasi, regulasi, atau prosedur yang tersedia, jika aparatur yang menjalankannya tidak kompeten, maka kualitas laporan keuangan akan sulit untuk optimal.

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

Hasil uji parsial menunjukkan nilai sistem informasi keuangan daerah menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,259 lebih besar dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,797 yang lebih besar dari α 0,05. oleh sebab itu hipotesis ketiga atau H_0 diterima dan H_a ditolak artinya sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Artinya Tidak adanya pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja anggaran mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan (baik berupa perangkat lunak, aplikasi, maupun infrastruktur teknologi pendukungnya) belum menjadi faktor yang secara signifikan menentukan baik buruknya kinerja anggaran yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar sistem informasi keuangan itu sendiri.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kinerja Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur

Hasil uji parsial menunjukkan nilai kompetensi aparatur menunjukkan t_{hitung} sebesar 3,275 lebih besar dari t_{tabel} yang memiliki nilai sebesar 1,694 dan nilai signifikannya sebesar 0,003 yang lebih kecil dari α 0,05. oleh sebab itu hipotesis keempat atau H_a

diterima dan H_0 ditolak artinya kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kinerja anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Artinya Adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja anggaran mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pengelola anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menentukan baik buruknya kinerja anggaran yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apa pun sistem informasi, regulasi, atau prosedur yang tersedia, jika aparatur yang menjalankannya tidak kompeten, maka kinerja anggaran akan sulit untuk optimal.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur Artinya Tidak adanya pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan (baik berupa perangkat lunak, aplikasi, maupun infrastruktur teknologi pendukungnya) belum menjadi faktor yang secara signifikan menentukan baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar sistem informasi itu sendiri. Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, Artinya Adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan baik buruknya laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apa pun sistem informasi, regulasi, atau prosedur yang tersedia, jika aparatur yang menjalankannya tidak kompeten, maka kualitas laporan keuangan akan sulit untuk optimal. Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, Artinya Tidak adanya pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja anggaran mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan (baik berupa perangkat lunak, aplikasi, maupun infrastruktur teknologi pendukungnya) belum menjadi faktor yang secara signifikan menentukan baik buruknya kinerja anggaran yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar sistem informasi keuangan itu sendiri. Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, artinya kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kinerja anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Artinya Adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja anggaran mengindikasikan bahwa dalam konteks pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pengelola anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menentukan baik buruknya kinerja anggaran yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apa pun sistem informasi, regulasi, atau prosedur yang tersedia, jika aparatur yang menjalankannya tidak kompeten, maka kinerja anggaran akan sulit untuk optimal.

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada pada tesis ini, maka diberikan saran-saran sebagai berikut Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur hal ini perlu diwaspadai, perlu dilakukan audit sistem untuk mengidentifikasi kelemahan teknis, seperti kesulitan pengoperasian, keterbatasan fitur, atau inkonsistensi data. Pastikan sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kebijakan perbaikan harus dilakukan

secara terintegrasi, peningkatan kompetensi aparatur harus diiringi dengan perbaikan sistem informasi. Aparatur yang kompeten akan mampu memanfaatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara optimal dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang baik akan mendukung kerja aparatur yang kompeten. Fokus pada penguatan sumber daya manusia (kompetensi aparatur) dan perbaikan sistem secara bersamaan. Langkah prioritas adalah memaksimalkan aset terkuat (kompetensi aparatur) sambil mengatasi kelemahan sistem melalui evaluasi dan penyesuaian. Dengan demikian tidak hanya kualitas laporan keuangan yang meningkat, tetapi juga kinerja anggaran dapat dioptimalkan untuk mendukung fungsi pengawasan dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yang lebih efektif. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penambahan responden dan variabel dikarenakan dalam penelitian ini terdapat beberapa hubungan antara variabel yang tidak berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Harjito & Martono. 2019. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Penerbit Ekonisia. Yogyakarta.
- Bahri, Syaitul. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Dwianti R.P & Surtikanti. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal*
- Erma Setiawati, Shinta Permata Sari. 2014. *Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi*. Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi FEB-UMS.
- Fahmi, Irham. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Hanafi, Dr. Mamduhm & Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ke 5. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Indra, Bastian. 2006. *Sistem Perencanaan dan Pengangguran Pemerintah Daerah Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi & Ayuningtya, Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugraheni, P & Subaweh. I. 2008. *Pengaruh Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. 13 (1). 48-58.
- Weston, J. Fred & Thomas, E. Copeland. 2019. *Manajemen Keuangan*. Diterjemahkan oleh : Drs. A. Jaka Wasana, M.S.M & Ir. Kibrandoko, M.S.M. Jilid 2. Aksara Publisher. Tangerang.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Edisi Keempat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yusup, M. 2016. *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Entrepreneurship*. 10 (2). 149-160.